



PPID PELAKSANA

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN,
DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG**



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Tabik pun...*

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Pelayanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sepanjang tahun 2022 yang merupakan tugas PPID Pelaksana Provinsi Lampung.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022 dan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Publik tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022 ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandar Lampung, Februari 2022
Atasan PPID Pelaksana
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura,



Ir. Kusnardi, M.Agr., Ec.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19631123 198803 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Dasar Hukum PPID Pelaksana	1
B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana	2
C. Maklumat Layanan Informasi Publik.....	3
D. Azas Layanan Informasi Publik.....	3
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik.....	4
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ...	6
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	6
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.....	7
C. Anggaran Layanan Informasi Publik	7
BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik	8
B. Katagori Informasi Publik	11
C. Katagori Informasi Publik Yang Dikecualikan	26
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi.....	29
1. Permintaan Informasi Pulik yang Dikabulkan.....	29
2. Permintaan Informasi yang Ditolak dan Alasannya...	36
E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.....	37
1. Website.....	37
2. Media Sosial.....	39
3. Papan Informasi.....	41
F. Kendala Layanan Informasi Publik.....	41
1. Internal.....	41
2. Eksternal.....	42
BAB IV. KESIMPULAN dan SARAN	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
LAMPIRAN	
1. Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana	
2. Struktur Organisasi PPID Pelaksana	
3. Dokumentasi Foto Kegiatan PPID Pelaksana	

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Dinas KPTPH	13
2. Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Dinas KPTPH	21
3. Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Dinas KPTPH	24
4. Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas KPTPH.....	27
5. Permohonan Data Dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022	31
6. Estimasi Waktu Pelayanan Terhadap Pemohonan Informasi Publik	36

PPID PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	4
3. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas KPTPH.....	5
4. <i>Front Office</i> dan <i>Desk</i> Layanan Informasi Publik Dinas KPTPH.....	6
5. <i>Flowchart</i> Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	10
6. Klasifikasi Pemohonan Informasi Publik.....	29
7. Klasifikasi Jenis Pemohonan Informasi Publik.....	30
8. <i>Layout Website</i> Dinas KPTPH Provinsi Lampung	37
9. <i>Layout Website</i> KPB Provinsi Lampung	38
10. <i>Website</i> OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah)	38
11. Lokasi Pelayanan Bibit.....	39
12. <i>Layout Instagram</i> Dinas KPTPH Provinsi Lampung	39
13. <i>Layout YouTube</i> Dinas KPTPH Provinsi Lampung	40
14. <i>Layout Facebook</i> Dinas KPTPH Provinsi Lampung.....	40
15. Papan Informasi	41

PPID PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/571/V.21.1/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/019/V.21.1/2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022.
3. Dokumentasi Foto Kegiatan PPID Pelaksana

PPID PELAKSANA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

BAB I.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID Pelaksana

Dasar hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung; dan
9. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/571/V.21.1/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

Tugas PPID Pelaksana

Secara garis besar, PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Secara rinci tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
3. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Fungsi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh bagian dan UPTD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

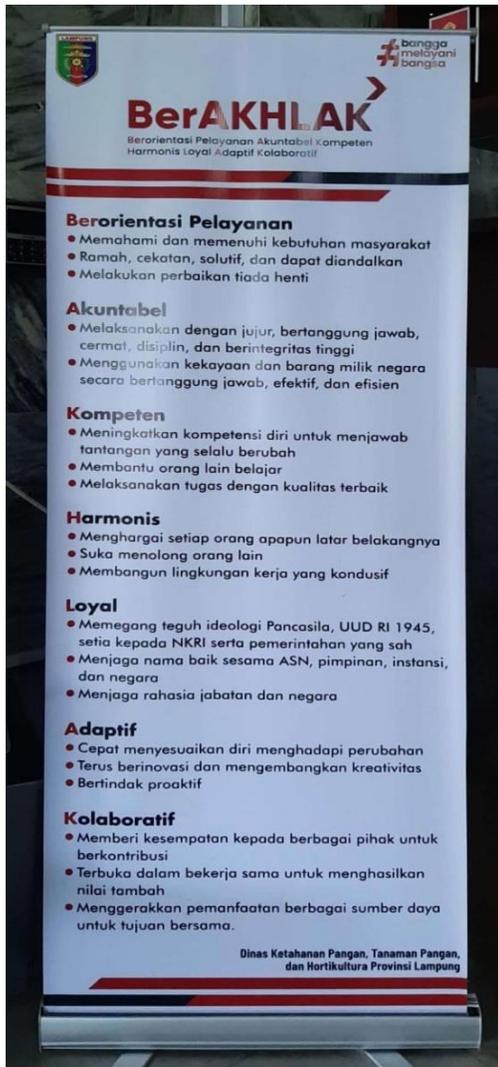
Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

D. Azas Layanan Informasi Publik

Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dirangkai dalam satu kata yaitu **“BerAKHLAK”** yaitu **Ber**orientasi pelayanan, **Ak**untabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daaktif dan **K**olaboratif. Secara rinci dijabarkan sebagai berikut.



Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2. Azas Pelayanan Informasi Publik

Ber AKHLAK

Berorientasi Pelayanan :

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel :

- Melakukan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

Kompeten :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal :

- Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif :

- Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
- Bertindak proaktif

Kolaboratif :

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.

Untuk itu agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/571/V.21.1/2022 tanggal 28 Maret 2022. Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas KPTPH

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman, meja informasi, *website* resmi serta dapat juga melalui *leaflet*, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu

1. *Desk* layanan informasi publik;



Gambar 4. *Front Office* dan *Desk* Layanan Informasi Publik Dinas KPTPH

2. Meja;
3. Kursi;
4. Komputer;
5. Printer;
6. LED TV;
7. Kursi tunggu
8. Akses internet;
9. Papan pengumuman;
10. Formulir-formulir;
11. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik; dan
12. Anggaran layanan informasi publik.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana DKPTPH berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/571/V.21.1/2022 sejumlah 14 (empat belas) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1 Orang Atasan Ketua PPID Pelaksana yaitu Kepala Dinas;

1 orang Ketua PPID Pelaksana yaitu Sekretaris Dinas;

1 orang Sekretaris PPID Pelaksana yaitu Kepala Bidang Hortikultura;

1 orang Koordinator Bidang Informasi Pelayanan dan Dokumentasi yaitu Kepala Bidang Tanaman Pangan;

1 orang Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

1 orang Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

2 orang Anggota Pengelola Sekretariat yaitu Kepala UPTD BBI Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering dan Kasubbag Perencanaan;

2 orang Anggota Pengelola Publikasi yaitu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

2 orang Anggota Pengelola Data yaitu Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih dan Kepala UPTD BBI Tanaman Pangan dan Alsintan; dan

2 orang Anggota Pengelola Penyelesaian Sengketa yaitu Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dan Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung belum mengalokasikan dana untuk pelayanan informasi publik secara khusus hanya berupa honorarium operator website dan disisipkan pada kegiatan Bimbingan Teknis Komunikasi Publik.

BAB III.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis website. Pada tahun 2017, telah dibentuk *website* Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan alamat <https://www.dinastph.lampungprov.go.id> yang memuat informasi publik bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

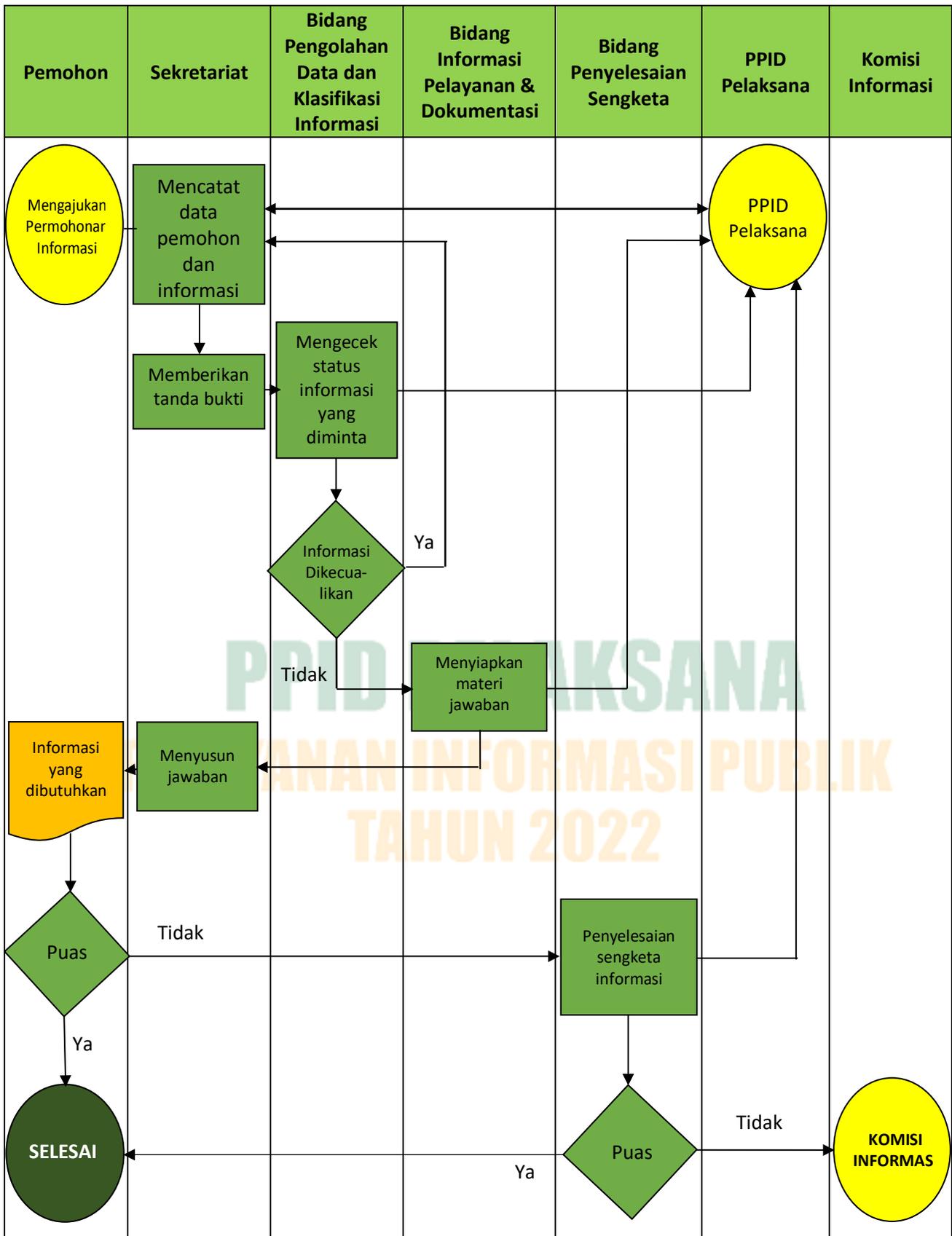
Melalui sistem berbasis *website* ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura termasuk tugas dan fungsi PPID Pelaksana Dinas KPTPH. Selain melalui *website*, layanan PPID Pelaksana Dinas KPTPH Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID Pelaksana Dinas KPTPH Provinsi Lampung yang bertempat di lobby Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam Nomor 1 Bandar Lampung.

Layanan informasi publik ini juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Mekanisme Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunaan informasi;
2. Petugas memberikan tanda tanda bukti penerimaan informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas;
3. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik dan pemohon mendatanganinya; dan
5. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID Pelaksana DKPTPH menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.



Gambar 5. Flowchart Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

B. Katagori Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Nama program dan kegiatan
2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara

9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. Neraca
 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. Daftar aset dan investasi;
 - e. Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 4. Alasan penolakan permohonan informasi publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
 2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi; dan
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Dinas KPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Visi dan Misi	Visi dan Misi Provinsi Lampung	Kasubbag Perencanaan	Tim penyusun RPJMD Provinsi	2019	Dokumen dan file softcopy	5 Tahun	Website DKPTPH
2	Rencana Strategis (RENSTRA)	Latar belakang, kondisi umum, gambaran pelaksanaan pelayanan, program dan rencana kegiatan dan indikator kinerja	Kasubbag Perencanaan	Tim penyusun Renstra DKPTPH	2019	Dokumen dan file softcopy	5 tahun	Website DKPTPH
3	Tupoksi DKPTPH	Uraian tugas pokok dan fungsi DKPTPH	Kasubbag Perencanaan	Tim Penyusun Renstra DKPTPH	2019	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
4	Profil Kepala DKPTPH	Memuat informasi pribadi, Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan Riwayat jabatan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2020	Dokumen dan file softcopy	Selama menjabat	Website DKPTPH
5	Alamat lengkap DKPTPH	Alamat lengkap Kedudukan kantor DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
6	Data Pegawai/ SDM	Informasi kepegawaian baik PNS maupun PTHL	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Simpedu
7	LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH dan e-LHKPN

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Nama Program dan Kegiatan	Program dan kegiatan pembangunan pertanian dan Ketahanan pangan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
9	Penanggungjawab dan Pelaksana Program	Nama pelaksana teknis program dan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Kepala DKPTPH	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
10	Target Capaian Program dan Kegiatan	Hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana program dan kegiatan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
11	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana program dan kegiatan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
12	Nilai Anggaran	Nilai pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana program dan kegiatan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
13	Ringkasan Informasi Kinerja	Target kinerja yang akan dicapai	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
14	LAKIP	LAKIP	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
15	Profil DKPTPH	Keterangan singkat tentang DKPTPH	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
16	Buku Saku DKPTPH	Keterangan produksi DKPTPH	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Laporan Layanan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
18	Regulasi peraturan, keputusan dan kebijakan	Regulasi peraturan, keputusan dan kebijakan DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
19	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
20	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
21	Kerangka Acuan Kerja	Gambaran umum dan penjelasan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
22	Penerimaan Pegawai	Penerimaan Pegawai yang bergabung pada DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	BKD Propinsi Lampung	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
23	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
24	Neraca Keuangan	Kondisi keuangan DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
25	RKA-KL/DPA	Rencana Kerja Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Daftar Aset	Benda bergerak dan benda tak bergerak yang menjadi milik DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
27	Laporan PAD	Pendapatan Asli Daerah DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
28	Daftar Pemohon Informasi Publik	Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diterima	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
29	Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
30	Daftar Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan maupun Ditolak	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik dan Yang Ditolak	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
31	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
32	Alur Informasi Publik	Tata cara memperoleh Informasi Publik	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
33	SOP Pelayanan Informasi	Panduan operasional pelayanan informasi	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Daftar Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Rincian Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
35	Daftar Informasi Wajib Tersedia dan Diumumkan secara serta merta	Rincian Informasi Wajib Tersedia dan Diumumkan secara serta merta	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
36	Daftar Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	Rincian Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
37	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Tim PPID Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
38	Daftar Peraturan Kepala Dinas KPTPH	Jumlah Peraturan Kepala Dinas KPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
39	Daftar Keputusan Kepala Dinas KPTPH	Jumlah Keputusan Kepala Dinas KPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
40	Daftar Kebijakan Kepala Dinas KPTPH	Jumlah Kebijakan Kepala Dinas KPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
41	Prosedur Tata Cara Pengaduan	Prosedur Tata Cara Pengaduan DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
42	SOP Pengaduan Pelayanan	SOP Pengaduan Pelayanan DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
43	Tindak Lanjut Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Daftar pengadaan barang dan jasa	Daftar pengadaan barang dan jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	
45	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website DKPTPH
46	Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website DKPTPH
47	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website DKPTPH
48	Prosedur Peringatan Dini Keadaan Darurat	Informasi tentang prosedur peringatan dini keadaan darurat	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama diperlukan	Website DKPTPH
49	SOP Evakuasi Keadaan Darurat	Standar operasional prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2022	Dokumen dan file softcopy	Selama diperlukan	Website DKPTPH
50	Rencana Kerja Tahunan	Program, Kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berjalan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	Setiap awal tahun berjalan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
51	Data Distribusi Pupuk	Data Distribusi Pupuk	Kepala Bidang PSP	Kepala Bidang PSP	2022	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Data Keadaan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Data Keadaan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Kepala UPTD Balai Proteksi KPTPH	Kepala UPTD Balai Proteksi KPTPH	Setiap musim tanam	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
53	Data Lahan Pertanian yang Terkena Dampak Bencana	Data Lahan Pertanian yang Terkena Dampak Bencana	Bidang Sarana Prasarana/BPTPH	Kepala Bidang PSP/BPTPH	Setiap musim tanam	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
54	Pelayanan Sertifikasi Benih	Pelayanan Sertifikasi Benih	Balai Sertifikasi & Pengawasan Benih	Kepala UPTD Balai Sertifikasi & Pengawasan Benih	Setiap pengajuan uji benih	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
55	Registrasi Kebun / Lahan Usaha	Registrasi Kebun / Lahan Usaha	Kepala Bidang Hortikultura	Kepala Bidang Hortikultura	2022	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
56	Klinik Tanaman	Klinik Tanaman	Kepala UPTD Balai Proteksi TPH	Kepala UPTD Balai Proteksi TPH	Tentative	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum meliputi antara lain:

- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
- c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Dinas KPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Informasi tentang bencana alam	Informasi tentang bencana alam	Kasubbag Tata Usaha	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH
2	Informasi tentang keadaan bencana non-alam	Informasi tentang keadaan bencana non-alam	Kasubbag Tata Usaha	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH
3	Bencana sosial	Bencana sosial	Kasubbag Tata Usaha	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH
4	Sebaran daerah yang terkena serangan hama penyakit yang berpotensi menular	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	Kepala UPTD Balai Proteksi TPH	Kepala UPTD Balai Proteksi TPH	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH
5	Kandungan racun pada bahan makanan	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan pemanfaatan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Tersedia oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Dinas KPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daftar Informasi Publik	Daftar informasi publik yang wajib tersedia dan dikecualikan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	Setiap ada perubahan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
2	Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan	Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/ Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan	Kasubbag Tata Usaha	Instansi terkait	Setiap Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
3	Informasi Tentang Organisasi dan Administrasi Kepegawaian	Hal terkait Dinas KPTPH dan administrasi kepegawaian	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	Setiap ada perubahan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH dan Aplikasi Simpedu
5	Agenda Kerja Dinas	Jadwal kegiatan yang diikuti maupun diselenggarakan	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	Setiap ada kegiatan Harian/mingguan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
6	Konsultasi / Kontak / Layanan Informasi	Pelayanan konsultasi, kontak dan layanan informasi	Kasubbag Perencanaan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Tentative	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
7	Surat- perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Surat- perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Kasubbag Keuangan	Kasubbag keuangan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Penatausahaan surat menyurat dinas	Koordinasi dan tindaklanjut surat menyurat dinas	Kasubbag tata usaha	Kasubbag tata usaha	12 bulan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
9	Daftar penelitian/ master plan	Daftar hasil-hasil penelitian/ master plan yang dilakukan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2022	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
10	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Kasubbag tata usaha	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu :

- a. Menghambat proses penegakan hukum
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
- h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
- j. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Secara lengkap, Informasi yang Dikecualikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mengikuti Daftar Informasi yang Dikecualikan Provinsi Lampung dan dapat dilihat dari link <https://www.ppid.lampungprov.go.id/dokumen/1663210557714.pdf>, namun khusus terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4. Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Dinas KPTPH

No dalam DIK Prov	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
16	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat Keresahan masyarakat	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sesuai Undang-Undang yang berlaku
17	Proses Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji Laboratorium yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar	Sampai terbitnya hasil uji laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk
18	Dokumen/ Data Uji Mutu Pangan di Produsen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil ujimutu pangan yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji lmutu pangan atau data produsen Terlindungi	Sampai dengan terbitnya sertifikat

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

Jumlah Permintaan Informasi

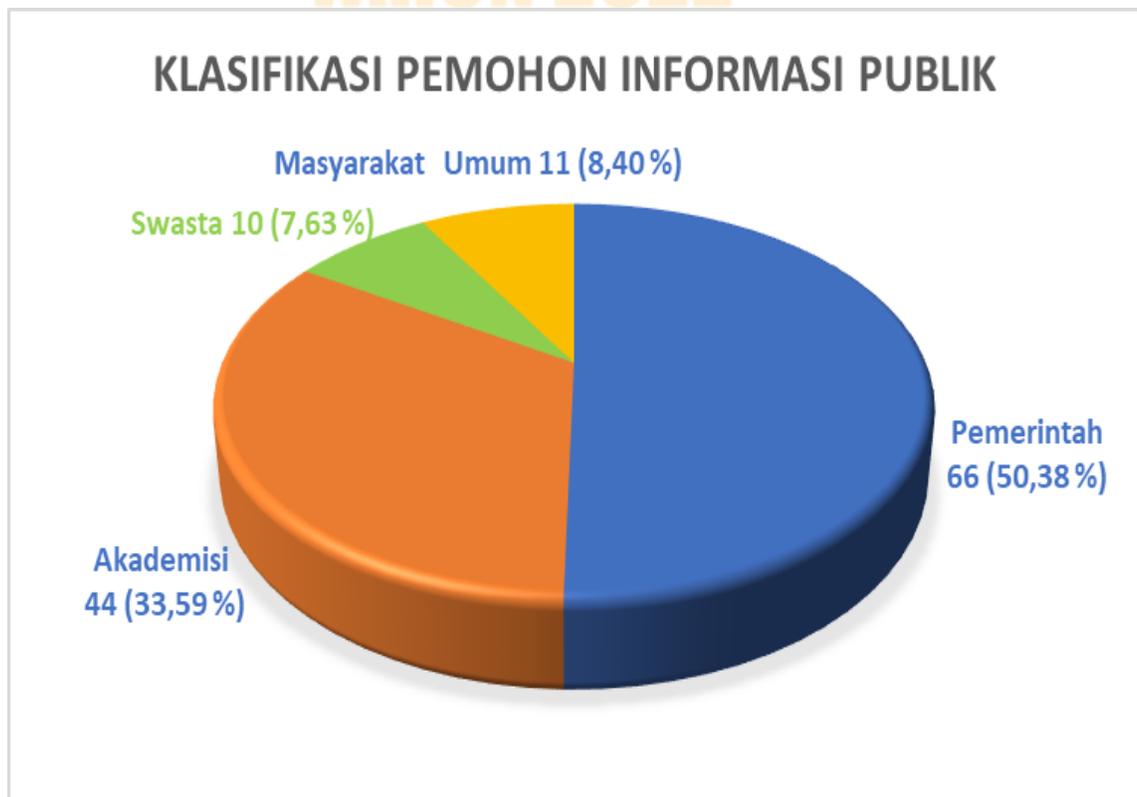
Dalam kurun bulan Januari hingga Desember Tahun 2022, jumlah permohonan informasi publik sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) permohonan informasi.

1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permintaan Informasi publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) permintaan pada intinya semua dikabulkan, karena informasi yang diminta oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Secara umum jumlah permohonan informasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung jika dilihat dari klasifikasi pemohon informasi public terdiri dari 11 pemohon dari masyarakat umum (8,40 %), 10 pemohon dari swasta (7,63%), 44 pemohon dari akademisi (33,59 %), dan 66 pemohon dari instansi pemerintah (50,38%).

Klasifikasi jenis pemohon informasi publik selengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut.

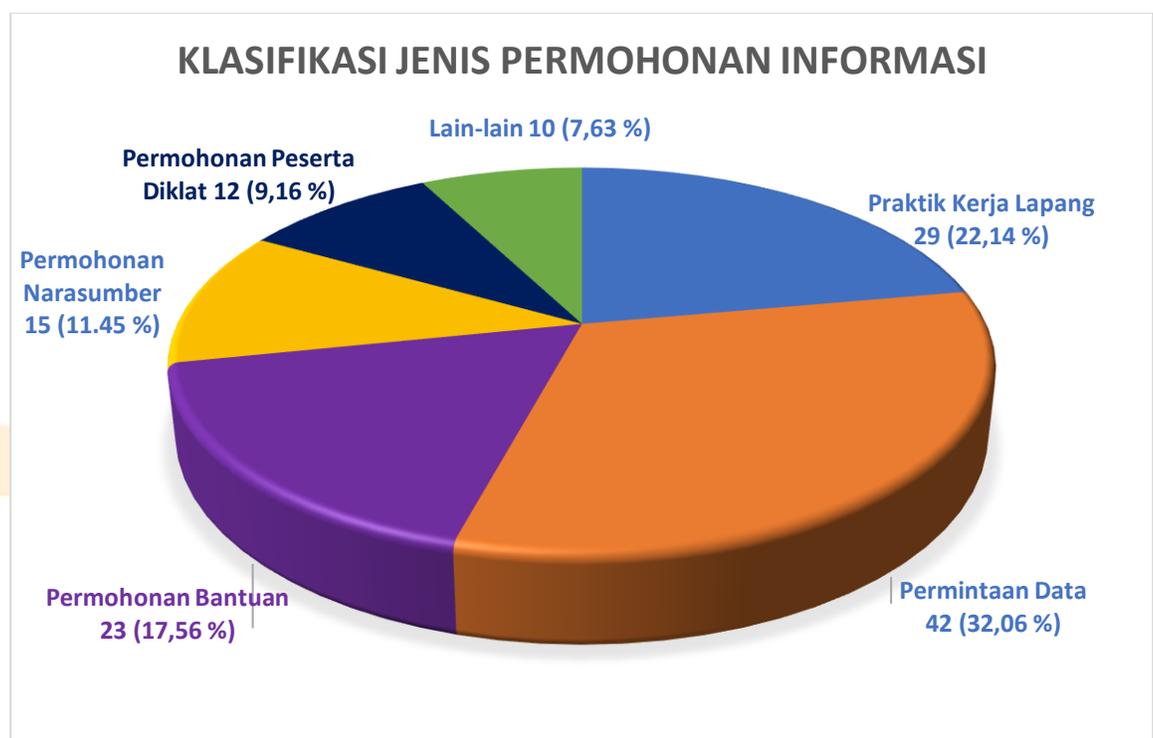


Gambar 6. Klasifikasi Pemohonan Informasi Publik

Sedangkan jika dilihat dari klasifikasi jenis permohonan informasi publik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Permohonan bantuan pertanian sebanyak 23 pemohon (17,56 %),
- b. Permohonan Narasumber sebanyak 15 pemohon (11,45 %),
- c. Permohonan Peserta Diklat sebanyak 12 pemohon (9,16 %),
- d. Permintaan Data sebanyak 42 pemohon (32,06 %),
- e. Praktik Kerja Lapangan sebanyak 29 pemohon (22,14 %), dan
- f. Informasi mengenai lain-lain sebanyak 10 pemohon (7,63 %).

Klasifikasi jenis permohonan informasi publik selengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 7. Klasifikasi Jenis Pemohonan Informasi Publik

Secara lengkap permohonan informasi publik yang diajukan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 5. Permohonan Data Dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik (Bidang/UPTD)	Nomor Surat	Layanan Publik Yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Tanggal Mengurus Layanan Publik
1	2	3	4	5	6
1	Tata Usaha	009/11.4.AU/F/2021	Permohonan Praktek Kerja Industri	SMK Labuhan Maringgai	3 Januari
2	Perencanaan	24/9//Bdl/Srt/B	Permohonan Data untuk Traelas dan Proyeksi Kinerja Ekonomi Lampung	Bank Indonesia	5 Januari
3	Tata Usaha	0026 / UN26.17 / PP / 2021	Izin Kerja Praktik	Unila	6 Januari
4	Perencanaan	060 / 0067 / 07 / 2022	Permintaan Data / Bahan Penyusunan Dokumen SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung	Sekda Provinsi Lampung	10 Januari
5	Tata Usaha	172 / SPn/PEKA / HMD Pertanian / XII /	Permohonan Izin Magang	Fakultas NakTan Undip	12 Januari
6	Tata Usaha	005/116/V.21.3/2022	Data Bencana Alam Banjir	Dinas KPTPH Tanggamus	12 Januari
7	Tata Usaha	281/A/E.11/IV.SMK.GM/11/2021	Permohonan Praktek Kerja	SMK Gajah Mada Bandar Lampung	13 Januari
8	Tata Usaha	421/001/09-TL.26/SMK-BLK/II/21	Permohonan Penempatan Praktik Kerja Lapang	SMK Bina Loka Karya	17 Januari
9	Tanaman Pangan	521/82/V.21/TB/I/2021	Permohonan Bantuan Benih Padi CBD (Cadangan Benih Daerah)	Dinas Pertanian Tulang Bawang	17 Januari
10	Tata Usaha	105/III.A/SMK.M2/F/2022	Permohonan Tempat Praktek Kerja Lapang	SMK 2 Muhammadiyah Bandar Lampung	18 Januari
11	Kuangan	900/14/VI.02/2022	Permintaan Data Dana Bergulir	BPKAD	24 Januari
12	Tanaman Pangan	521/078/IV.22/2022	Permohonan Bantuan Benih Padi CBD (Cadangan Benih Daerah)	Sekda Provinsi Lampung	26 Januari
13	Tata Usaha	423-5/009/139/1/2022	Permohonan tempat Prakerin	SMK PGRI 9 Bandar Lampung	26 Januari
14	Perencanaan	686/UN26.14/PN 01.00.00/2021	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Fakultas Pertanian Unila	28 Januari
15	Horti	045/174/V.13/2022	Permohonan Bibit Pohon Buah	Dinas Perhubungan	4 Februari
16	Perencanaan	B/328/1/2022/DJPOT	Permohonan Data	Direktorat Jendral	8 Februari
17	Proteksi	521/424/34-W/III.11/2022	Permohonan Bantuan Pesticida Komoditas Hortikultura	Dinas Pertanian Lampung Utara	10 Februari
18	Kuangan	B-3297/L.8.3/DPP/02/2022	Permintaan Data Pemetaan Ancaman,Gangguan,Hambatan dan Tantangan	Kejaksaan Tinggi Lampung	17 Februari
19	Tanaman Pangan	1453/UN26.14/PN/01.00.00/2022	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Fakultas Pertanian	21 Februari
20	Perencanaan	006/IF/FIK/UBL/II/2022	Permohonan Izin Penelitian	UBL	21 Februari
21	Perencanaan	007/IF/FIK/UBL/II/2022	Permohonan Izin Penelitian	UBL	21 Februari
22	Ketersediaan	045/067407/2022	Permohonan Data Produk Layanan	Sekda Provinsi Lampung	22 Februari
23	Perencanaan	480/0709/V.14.02/2022	Permintaan Laporan PPID Pembantu Tahun 2021	Sekda Provinsi Lampung	23 Februari
24	Perencanaan	S-439/PW08/4/2022	Permintaan Data Agenda Prioritas Pengawasan Daerah Tahun 2022	BPBK	1 Maret
25	Konsumsi	B-129/TU.020/6.6.3/3/2022	Permintaan Peserta Pelatihan	Dirjen PPHP	7 Maret
26	Tata Usaha	893.3/0829/VI.05/2022	Panggilan Calon Peserta Diklat	Sekda Provinsi Lampung	8 Maret
27	Tata Usaha	1827/UN26.14/TU.00.00/2022	Permohonan Izin Praktik Umum	Unila	10 Maret
28	Tata Usaha	1919/UN26.14/TU.00.00/2022	Permohonan Izin Praktik Umum	Unila	11 Maret

NO	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik (Bidang/UPTD)	Nomor Surat	Layanan Publik Yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Tanggal Mengurus Layanan Publik
1	2	3	4	5	6
29	Tata Usaha	B/1235/Itg.F2/Pt.01.04/2022	Permohonan Permintaan Data	Itera	15 Maret
30	Tata Usaha	B/784/ITG.F3/Pk.01.06/2022	Permohonan Praktik Kerja	Itera	16 Maret
31	Tata Usaha	B/1033/ITG.F3/PK.01.06/2022	Permohonan Praktik Kerja	Itera	16 Maret
32	Perencanaan	045/1013/04/2022	Permintaan Data	Sekda Provinsi Lampung	16 Maret
33	BPTP	B-229/TU.020/C.5/3/2022	Permohonan Narasumber Pengelolaan Hama Terpadu untuk Tanaman Padi	Dirjen TP	18 Maret
34	Tata Usaha	1787/UN26.14/TU.00.00/2022	Permohonan Izin Praktik Umum	Unila	24 Maret
35	TP, Proteksi	521/514/V.21/TB/TP/III/2022	Permohonan Bantuan Benih Padi CBD (Cadangan Benih Daerah)	Dinas Pertanian Tulang Bawang	30 Maret
36	PSP	003/MM/RS/XII/2021	Permohonan Bantuan Sumur Bor Tenaga Surya	Kelompok Tani Mekar Mandiri Wilayah Binaan Rawa Selapan Kecamatan Candipuro	31 Maret
37	PSP	5/MJ/SDW/XII/2021	Permohonan Bantuan Sumur Bor Tenaga Surya	Kelompok Tani Maju Jaya Desa Bidowaluyo Kecamatan Sidomulyo	31 Maret
38	PSP	09/KLP.HM/SRG/XII/2021	Permohonan Bantuan Sumur Bor Tenaga Listrik	Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Kuala Sekampung Kecamatan Seragi	31 Maret
39	PSP	17/KT.MR/XII/2021	Permohonan Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Kelompok Tani Margo Rahayu Desa Sidoharjo Kecamatan Way Pamji Kabupaten Lampung Selatan	31 Maret
40	PSP	02/KM/SDW/XII/2021	Permohonan Bantuan Sumur Bor Tenaga Surya	Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidowaluyo	31 Maret
41	Tata Usaha	B/2041/ITG.F3.2/PK.01.06/2022	Permohonan Praktik Kerja	Itera	8 April
42	Tata Usaha	421.5/023/SMK SWD 1/03	Permohonan Tempat Praktik Kerja	SMK Swadhipa 1 Natar	11 April
43	Tanaman Pangan	2356/UN26.14/PN.01.00.00/2022	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Unila	14 April
44	Tanaman Pangan	2358/UN26.14/PN.01.00.00/2023	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Unila	19 April
45	Keuangan/PSP	045/1443/V.05/2022	Permohonan Data Lokasi Indikatif Kegiatan Pengadaan Tanah	Sekda Provinsi Lampung	21 April
46	PSP	800/575/V/V.04/2022	Permohonan Informasi dan Data	Dinas PSDA	25 Mei
47	Tata Usaha	893.3/1879/VI.05/BPK/2022	Permintaan Peserta Diklat Bela Negara Berbasis Profesi	Sekda Provinsi Lampung	31 Mei
48	PSP	SA.02.03-AW/276	Permohonan Informasi Data	PUPR Mesuji Sekampung	7 Juni
49	Pangan Segar	004/PBA/ADM/VI/2022	Permohonan Petugas Pengambil Contoh (PPC)	PT. Putra Bali Adya Mulia	9 Juni
50	Tata Usaha	S.01/005/FB15.06/2022	Izin Tempat Praktik Kerja	Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia	9 Juni
51	Penyuluhan	B/189/VI/2022	Permohonan Bantuan Bibit	Komando Operasi Udara I Pangkal TNI AU	10 Juni
52	Horti	462.1/593/V.07/PRSTSM6/2022	Permintaan Bibit Tanaman	Dinas Sosial Mardiguna	13 Juni

NO	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik (Bidang/UPTD)	Nomor Surat	Layanan Publik Yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Tanggal Mengurus Layanan Publik
1	2	3	4	5	6
53	Perencanaan	009/13/Pampel.Kunjungan Desa Sidoharjo/UKM-Penelitian/UL/VI/2022	Permohonan Sebagai Pemateri	Unila	14 Juni
54	Perencanaan	123/SC-PPC/VI/2022	Permohonan Petugas Pengambil Contoh (PPC)	SSD Sucpen	15 Juni
55	Tata Usaha	893.3/2073/VI.05/BPKTUF/2022	Permintaan Peserta Diklat Pengadaan Barang/jasa Tingkat Dasar Th. 2022	Sekda Provinsi Lampung	15 Juni
56	BPSBTPH	522/583/V.24/B.32/2022	Permohonan Informasi Data Jumlah Sertifikat/Label	Dinas Kehutanan	16 Juni
57	PSP	045/2117/V.II/2022	Permintaan Data Balihan dan Laporan Berkala	Sekda Provinsi Lampung	17 Juni
58	Tata Usaha	800/1160/IV.04/2022	Permintaan Data dan Update Data	Sekda Provinsi Lampung	27 Juni
59	Konsumsi	2239/PL.002/J.6/2022	Permohonan Peserta Diseminasi	BKKBN Lampung	28 Juni
60	PSP	521/412.a/02/10-SK/2022	Permohonan Menjadi Narasumber	Pemkab Lampung Timur	30 Juni
61	Tata Usaha	3378/UN26.17/PP/2022	Izin Praktik Kerja Lapangan	Unila	30 Juni
62	Tata Usaha	421.5/073.10/V.01/SMKN8BL/2022	Permohonan Tempat PKL	SMK 8 Bandar Lampung	5 Juli
63	Perencanaan	890/1704/VI.05/BPKTI/2022	Panggilan Calon Peserta Diklat	Pemprov Lampung Badan Pembangunan SDM daerah	8 Juli
64	PSP	800/358/V.05/2022	Permohonan Data dan Informasi	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta K	13 Juli
65	Perencanaan	700/840/IV.01/2022	Permintaan Data Manajemen Resiko di Perangkat Daerah	Inspektorat	14 Juli
66	Tanaman Pangan	TAN.04.02/508/D.11.M.Ekon.5/07/2022	Permohonan Dukungan Data Lapangan untuk Persiapan Kajian Subsidi Pupuk Langsung kepada Petani (SLP)	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	15 Juli
67	Penyuluhan	4145/UN26.14/PN.01.00.00/2022	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Unila	15 Juli
68	Penyuluhan	4298/UN26.14/PN.01.00.00/2022	Permohonan Izin Penelitian	Unila	22 Juli
69	Tanaman Pangan	052/PW/20/C.2.3/07/2022	Pemintaan Data Badan Pemeriksa Keuangan RI	Kementan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perbenihan	26 Juli
70	Konsumsi	521/596/IV.10/2022	Permohonan Narasumber Bimtek Pengambilan Data NBM/PPH	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	27 Juli
71	PSP	331/WIL.II/S/VII/2022	Permintaan Data dan Informasi	Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI	27 Juli
72	PSP	045/2511/V.05/2022	Permintaan Data dan Informasi	Sekda Provinsi Lampung	29 Juli
73	BBI TP dan Alsintan	521/573/DKPPKH-TPH/XI/2022	Permohonan Narasumber	Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Selatan	29 Juli
74	Penyuluhan	800/ /225/2022	Permohonan Narasumber	Dinas Pertanian Tanggamus	8 Agustus
75	Tanaman Pangan	001/B/Panpel-Khatulistiwa-2022/Hmj/Thp/FP/UL/VI/2022	Permohonan Bantuan Dana	Unila	9 Agustus
76	PSP	KI-550/44/DPDRI/Lampung/VIII/2022	Permohonan Menjadi Narasumber	DPR RI	11 Agustus
77	Konsumsi	41.1/261/III.09/2022	Permohonan Narasumber Bimtek Analisa Pola Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat	12 Agustus
78	BBI TH dan PLK	B/1019/VIII/2022	Permohonan Bantuan Bibit Benih	Komando Resor Militer Garuda Hitam	12 Agustus

NO	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik (Bidang/UPTD)	Nomor Surat	Layanan Publik Yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Tanggal Mengurus Layanan Publik
1	2	3	4	5	6
79	Tata Usaha	4047/UN26.14/PN.01.00.00/2022	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Unila	16 Agustus
80	Ketersediaan	4406/UN26.14/PN.01.00.00/2022	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Unila	18 Agustus
81	Tata Usaha		Permohonan Surat Izin Magang	UIN Radin Intan	23 Agustus
82	Perencanaan	050/995/VI.011/P3M/2022	Permintaan Data Realisasi Program Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Th 2021	Bappeda	22 Agustus
83	Penyuluhan	521/1696/D-9/05/2022	Permintaan Narasumber/Fasilitator Pelatihan Ruton PPL	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan K	26 Agustus
84	Tata Usaha	270/UN.10/DE/PP.00/(/8/2022	Permohonan Izin Magang	UIN Radin Intan	29 Agustus
85	Konsumsi	414/07/kwt/1/2022	Permohonan Bantuan Bibit Tanaman	Kelompok Tani Wanita Bogenvil	5 September
86	PSP	01/ktkm/BI/VI/2022	Permohonan Bantuan Pembuatan Sumur Bor	Kelompok Tani Khanggam	5 September
87	PSP	03/kwt.sk/VII/2022	Permohonan Bantuan Bibit Buah dan Sayuran	Kelompok Wanita Tani	5 September
88	PSP		Permohonan Bantuan Jaringan Irigasi Desa	Kelompok Tani Tunas Marga	5 September
89	PSP	800/485/IV.5/2022	Permohonan Data Pemdukung Sistem Informasi Pengawasan Teknis (siswatek) Penataan Ruang	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta K	7 September
90	Tanaman Pangan	001/MSI/09/2022	Permohonan Bantuan Pupuk Organik Budidaya Singkong	Masyarakat Singkong Indonesia Lampung	8 September
91	Ketersediaan	524/1743/V.23/E1/2022	Permintaan Personil Tim Penyusun Prognosa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9 September
92	Perencanaan	556/533/V.20/IX/2022	Permintaan Peserta Bimtek Pembinaan Event Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9 September
93	PSP	009/KTKUB/STH/IX/2022	Permohonan Bantuan Perpipaian	Kelompok Tani Kihung Lestari Kelurahan Sukarame I	20 September
94	BBI TP dan Alsintan	500/202/WT.UP/EKS/IX/2022	Permohonan Bantuan Pinjam Pakai Unit Exavator untuk Cetak Sawah	PT. Wahana Raharja BUMD Provinsi Lampung	20 September
95	Penyuluhan	78/B-30/DPDRI.LPG/IX/2022	Permohonan Data	DPD RI	21 September
96	Tanaman Pangan	005/435/IV.04-WK/TPH/2022	Permohonan Bantuan Power Threaser Multuguna	Dinas Pertanian dan Peternakan	26 September
97	Tanaman Pangan	521/2532/Da.VI.20/5.1/2022	Permohonan Bantuan Saprodi Pupuk Organik Budidaya Tanaman Singkong	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	27 September
98	Tata Usaha	191/SMK/Y-BK/S.5/IX/2022	Permohonan Praktek Kerja Mandiri	SMK Budi Karya	28 September
99	Hortikultura	3418/PL15/DT.00.00/2022	Permohonan Narasumber	Politeknik Negeri Lampung	29 September
100	Tata Usaha	052/SMK.WK/EII/IX/2022	Permohonan Izin Tempat Praktek Kerja (PKL)	SMK Wiyata Karya	5 Oktober
101	Tata Usaha	002/B/Panpel-Semnas/2022	Permohonan Data Bantuan Dana Seminas Nasional	Unila	11 Oktober
102	Tata Usaha	5729/UN26.17/PP/2022	Izin Kerja Praktik	FMIFA Unila	14 Oktober
103	PSP	800/652/V.05/2022	Permohonan Narasumber	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta K	20 Oktober
104	Perencanaan	6339/UN26.14/PN.01.00.00/2022	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Unila	24 Oktober
105	Tata Usaha	279/SK-Mon/X/2022	Permintaan Wawancara	MONEV	26 Oktober

NO	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik (Bidang/UPTD)	Nomor Surat	Layanan Publik Yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Tanggal Mengurus Layanan Publik
1	2	3	4	5	6
106	Perencanaan	001/DPW-HPPMI/X/2022	Permohonan Data Hibah	HPPMI DPW Provinsi Lampung	28 Oktober
107	Tata Usaha	289/A/B.11.IV.SMK.GM/10.2022	Permohonan Praktek Kerja	SMK Gajah Mada Bandar Lampung	31 Oktober
108	Penyuluhan	6517/UN26.14/PN.01.00.00/2022	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Unila	1 November
109	Penyuluhan	521/1547/IV.22/2022	Permohonan Narasumber	Dinas TPH dan Perkebnunan Kabupaten Lampung Se	1 November
110	Perencanaan	B-16287/Dt.23/PP.06.11/11/2022	Permohonan Narasumber FGD Rancangan Awal Isu Strategis dan Proyek Prioritas 2024	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI	7 November
111	Tata Usaha	B-2991/TI.010/A/8/10/2022	Permohonan Data Alamat Kantor Dinas Lingkup Pertanian	Sekjen Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	7 November
112	Tata Usaha	61/PL15/KM/2022	Permohonan Penempatan Praktik Kerja Lapang	Politeknik Negeri Lampung	7 November
113	Keuangan	521/3855/III.10/2022	Permohonan Hibah Aset	Dinas TPH Lambar	15 November
114	PSP	B/801/XI/2022/Reskrim	Permintaan Keterangan Ahli	Kapolri Daerah Lampung Resort Lamsel	15 November
115	Penyuluhan	6987/UN26.14/PN.01.00.00/2022	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Unila	16 November
116	Proteksi	02/Plant/SKK/XI/2022	Permohonan Narasumber	PT. Sari Kresna Kimia	17 November
117	Tanaman Pangan	B.554/SR.430/C.6.1/11/2022	Permohonan Data Sebaran dan Penerima Bantuan Sarana Paspanen TP TA. 2021 dan 2022	Dirjen TP Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP	18 November
118	Tanaman Pangan	005/DIR-WPI/XI/2022	Permohonan Audiensi Wilmar Padi Indonesia	Wilmar Padi Indonesia	22 November
119	Tata Usaha	434/4576/IV.01/2022	Permohonan Narasumber	Sekda Provinsi Lampung	25 November
120	Proteksi	893.3/163/VI.05/2022	Panggilan Calon Peserta Diklat	Sekda Provinsi Lampung	25 November
121	Pangan Segar	008/LDCTI/PPC/XI/2022	Permohonan Pengambilan Sample Shipment ke Jepang	LDC	28 November
122	Proteksi	107/RPH/11/2022	Permohonan Sarana Gerdal OPT	Badan Pangan Nasional	28 November
123	PSP	254/V.26/Dagri.I/XI/2022	Permintaan Narasumber	Dinas Perlindungan dan Perdagangan	2 Desember
124	PSP	660/654/V.10/2022	Permintaan Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung Tahun 2022	Dinas Lingkungan Hidup	7 Desember
125	Tata Usaha	UN26.14.02/PP/2022	Permohonan Wawancara	Unila	7 Desember
126	Keuangan	B-3616/TU.040/6.1/12/2022	Inventarisasi Data dan Survei Kinerja	Inspektorat Jenderal Kementan	12 Desember
127	Pangan Segar	421.5/180.51/V.01/SMKN8BL/2022	Permohonan Tempat PKL	SMKN 8 Bandar Lampung	12 Desember
128	Keuangan	045/4936/05/2022	Pemrintaan Data Paket Strategis Tahun Anggaran 2023	Sekda Provinsi Lampung	16 Desember
129	Tata Usaha	423.5/136/139/XII/2022	Permohonan Tempat PKL Praktik Kerja Lapangan Tahun 2023	SMK PGRI 4 Bandar Lampung	16 Desember
130	BPSBTPH	B-4713/KP.220.C.1/12/2022	Pendataan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman	Dirjen TP	19 Desember
131	PSP	329/FH-UBL/XI/2022	Mohon Izin Penelitian	Universitas Bandar Lampung	23 Desember

2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya

Sepanjang tahun 2022 semua permohonan informasi publik tidak ada yang ditolak oleh PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung karena informasi yang diminta oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Waktu Pemenuhan Informasi

Waktu Pemenuhan Informasi sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Apabila informasi yang dimaksud oleh pemohon tersedia, maka informasi publik dapat diperoleh saat itu juga.
- c. Apabila informasi yang diminta belum tersedia, maka waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
- d. Jika PPID Pelaksana membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- e. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP)
- f. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Klasifikasi waktu dalam melakukan pelayanan terhadap pemohon informasi dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 6. Estimasi Waktu Pelayanan Terhadap Pemohonan Informasi Publik

No	Jenis Informasi	Estimasi Waktu Layanan	Keterangan
1.	Informasi tersedia setiap saat	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
2.	Informasi yang diumumkan secara berkala	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
3.	Informasi yang diumumkan serta merta	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
4.	Informasi yang dikecualikan	-	Tidak dapat dilayani

Keterangan : * Apabila dokumen yang diminta oleh pemohon tersedia
 Apabila dokumen yang diminta oleh pemohon belum tersedia selambat-lambatnya informasi akan disampaikan dalam waktu sepuluh hari.

E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Website

Portal Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu <http://dinastph.lampungprov.go.id> menyajikan data-data dan informasi terkait tugas pokok dan kinerja dari seluruh bidang/UPTD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan jumlah pengunjung sebanyak 259.414 user.



Gambar 8. Layout Website Dinas KPTPH Provinsi Lampung

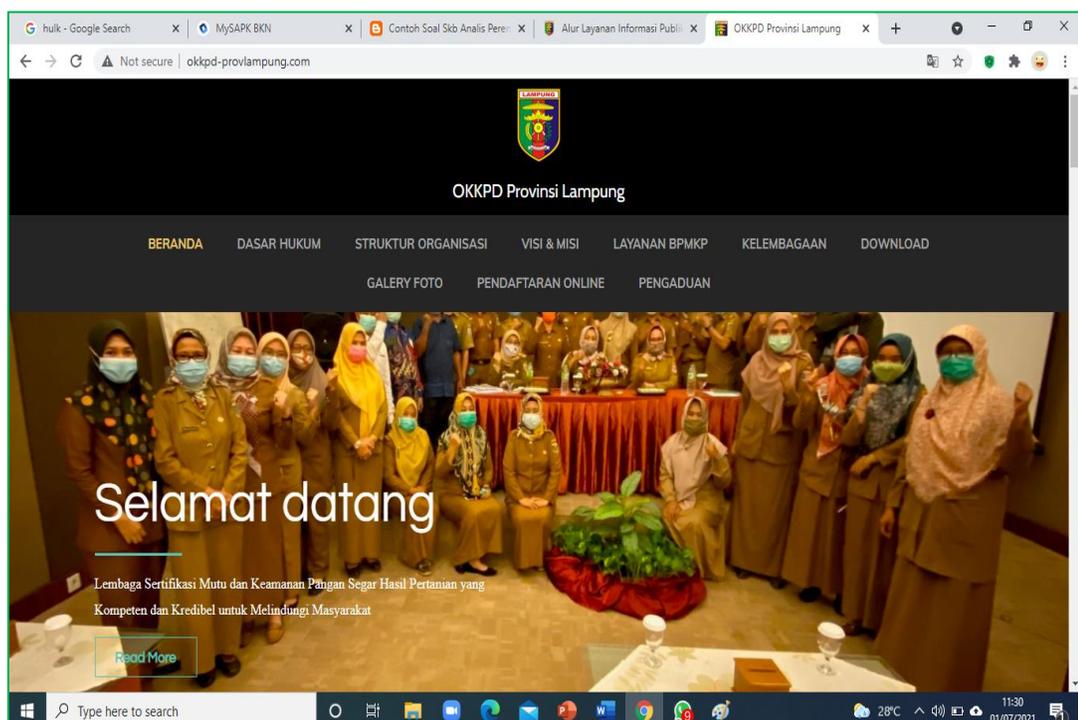
dan terhubung dengan :

- a. Website Provinsi Lampung yaitu <http://lampungprov.go.id>
- b. KPB atau Program Kartu Petani Berjaya adalah suatu program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama yaitu <https://www.kpb.lampungprov.go.id>



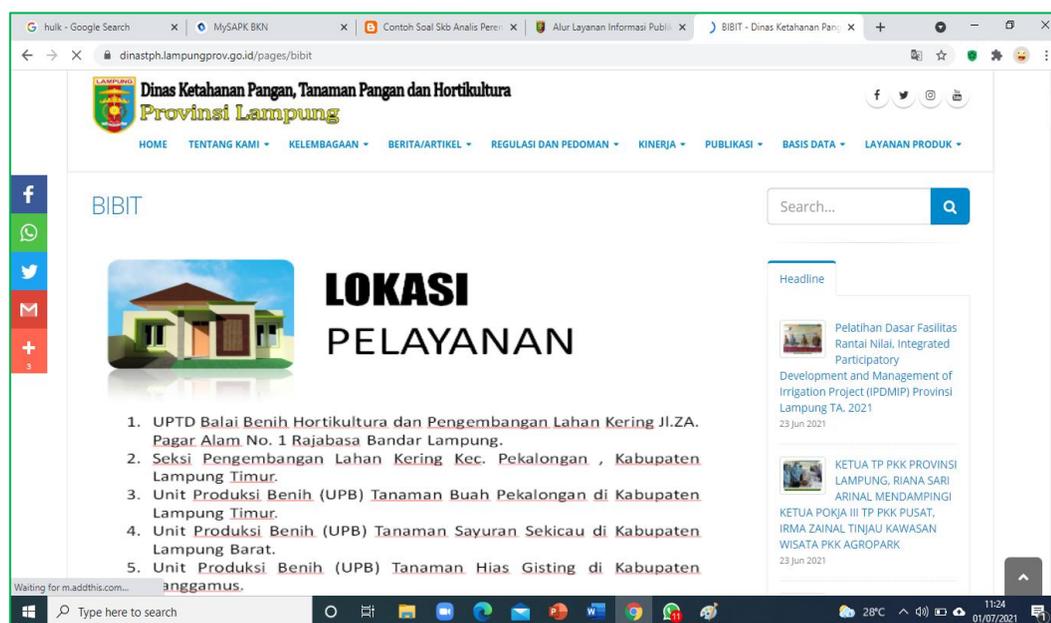
Gambar 9. Layout Website KPB Provinsi Lampung

- c. OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) sebagai Lembaga Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian yang Kompeten dan Kredibel untuk Melindungi Masyarakat yaitu <http://okkpd-provlampung.com>



Gambar 10. Website OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah)

d. Bibit yang berisikan informasi lokasi pelayanan bibit tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Lampung



Gambar 11. Lokasi Pelayanan Bibit

2. Media Sosial

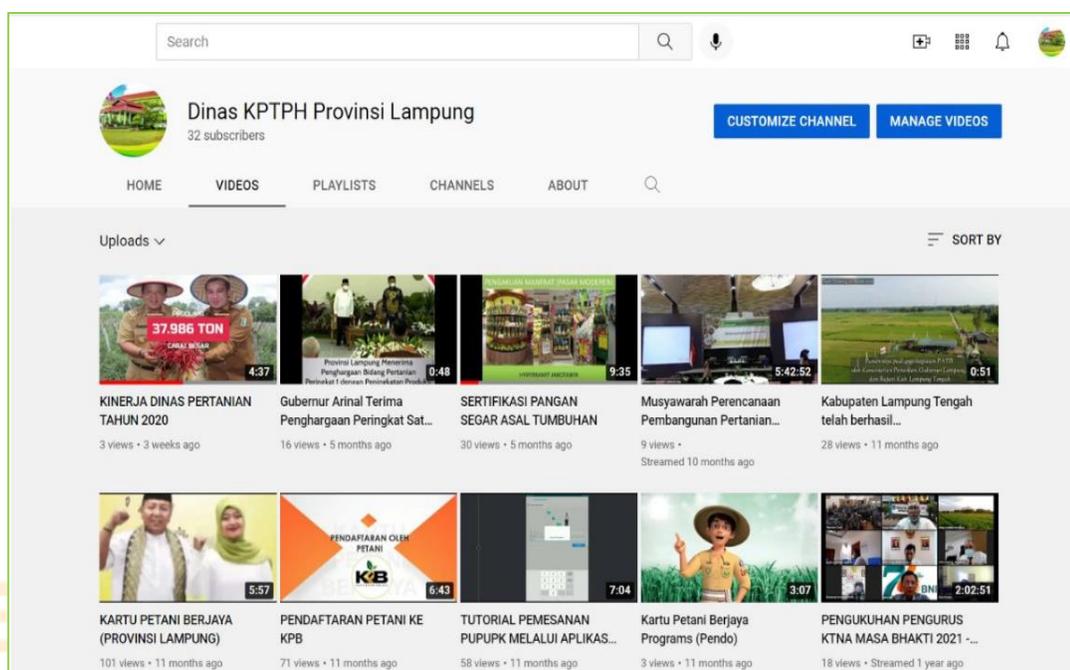
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung memiliki beberapa akun media sosial sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun media sosial Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu sebagai berikut :

a. Akun Instagram Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu <https://www.instagram.com/dinas.kptph.lampung/> yang telah memiliki 2.548 pengikut dan 2.500 posting berita.



Gambar 12. Layout Instagram Dinas KPTPH Provinsi Lampung

- b. Channel Youtube dengan nama Dinas KPTPH Provinsi Lampung dengan alamat <https://www.youtube.com/channel/UCMwKi-B9nUktADudg-rYrxw/videos>. Akun Youtube ini berisikan informasi berupa video kegiatan Menteri Pertanian, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan pelaku pertanian lainnya, akun ini telah memiliki 45 subscriber dan 22 konten video dengan 30 jam tayang.



Gambar 13. Layout YouTube Dinas KPTPH Provinsi Lampung

- c. Akun Facebook dengan nama PertanianKPTPH Lampung dan alamat <https://www.facebook.com/dinaskptphlampung> telah memiliki 1.145 pengikut.



Gambar 14. Layout Facebook Dinas KPTPH Provinsi Lampung

- d. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat pula mengirimkan email ke ren.kptph.lpg@gmail.com dan dinastph@lampungprov.go.id

3. Papan Informasi

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang memberikan informasi mengenai jam pelayanan publik PPID dalam bentuk *standing banner*. Selain itu pada masing masing bidang/UPTD biasa telah tersedia papan pengumuman terkait jenis dan persyaratan layanan informasi dan informasi umum lainnya yang diberikan.



Gambar 15 . Papan Informasi

G. Kendala Layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik yaitu: Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

- a. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi;
- b. Interpretasi SOP belum maksimal. Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID tidaklah semudah seperti apa yang dirancang.

Interpretasi di lapangan adakalanya mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan.

- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID Pelaksana DKPTH Provinsi Lampung sebagai unit layanan informasi publik yang akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat umum.
- d. Belum tersedia ruangan khusus sebagai tempat *desk* unit layanan informasi publik.
- e. Belum memadai dukungan anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pelaksana DKPTH Provinsi Lampung

2. Kendala Eksternal

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang/UPTD tertentu, yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik.
- b. Koneksi internet yang kurang stabil
- c. Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pelaksana Dinas KPTPH Provinsi Lampung. Seorang Pemohon Informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Selain itu, informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya

BAB IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Tahun 2022 oleh PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan terlaksana dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk memepertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas berbasis pada layanan informasi publik yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

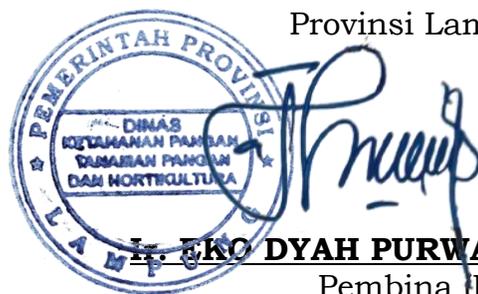
B. Saran

Namun demikian, beberapa hal yang diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi dibutuhkan informasi yang valid dan akurat. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti ruangan khusus, komputer dan *free wifi* pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID kedepannya
4. Mempersingkat waktu pelayanan untuk lebih efektif, cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon informasi akan merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang diberikan secara akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan..
5. Selalu berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan informasi dan data informasi publik dengan baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023

Ketua PPID Pelaksana DKPTPH
Provinsi Lampung,



M. EKO DYAH PURWANINGSIH, M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19660810 199203 2 004

LAMPIRAN

PPID PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022